

Aksi Damai Diam di depan Istana Presiden – Kamis ke- 92
JSKK Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM
Jl. Bonang IA, Menteng, Jakarta Pusat 12870 Telp. 021-31931181

Nomor : 64 /Surat Terbuka_JSJKK/X/2008
Hal : PEMILU 2009: TINGGALKAN PARPOL PRO
PELAKU PELANGGAR HAM & PRO ORBA

Jakarta, 11 Desember 2008

Kepada Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Jakarta

Bapak Presiden, kami komunitas yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) masih tetap tegar berjuang untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM. Dalam aksinya yang ke-92 ini setiap hari Kamis dengan cara diam berdiri, berpayung dan berpakaian hitam, menggelar spanduk dan membagikan selebaran di depan Istana Presiden; kami sungguh menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar pada Pemilu 2009 tidak memilih Partai Politik pro-pelaku pelanggaran HAM dan pro-Orde Baru.

Kita tentu masih ingat pada gerakan mahasiswa '98 dan perjuangan rakyat pro-demokrasi yang berhasil melengserkan pemerintahan Orde Baru yang telah menjalankan sistem pemerintahan Indonesia secara otoriter, militeristik dan korup. Namun pemerintahan demokratis yang kita cita-citakan tidak kunjung terbentuk, karena kroni-kroni Soeharto berhasil melakukan konsolidasi untuk melanjutkan langkah politik status quo a la Orde Baru. Sikap Fraksi-fraksi DPR RI periode 2004 - 2009 pun menunjukkan politik lama kembali berkuasa dengan gagalnya agenda reformasi, seperti kewajiban untuk mengadili Soeharto dan semua kroni-kroninya, korupsi yang kian merajalela serta masih lemahnya independensi para aparat penegak hukum untuk meneguhkan supremasi hukum di Indonesia.

Kini setelah kita melewati fase 10 tahun perjalanan reformasi, banyak aktivis mahasiswa eksponen '98 yang hanyut dalam arus politik modifikasi Orde Baru. Mereka mungkin lupa pada kawan-kawannya yang gugur dalam memperjuangkan *amanat penderitaan rakyat*. Anggota DPR RI periode 2004 - 2009 yang diisi sekitar 17 % orang muda, namun mereka tidak bersikap ketika DPR secara bulat menolak pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Begitu pula ketika Komnas HAM menyerahkan berkas penyelidikan Kasus Orang Hilang kepada DPR, tidak terlihat sambutan positifnya hingga kasusnya mengendap lama di sudut Senayan.

Begitu pula dengan iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara gencar muncul di media televisi belakangan ini, membuat kami bertanya-tanya apakah iklan tersebut merupakan sikap kompromistis terhadap sejarah masa lalu, Soeharto khususnya, yang dikenal tidak saja sebagai pimpinan negara yang gemar bertindak korup namun juga telah menggunakan hak prerogatif-nya sehingga melanggar hak kewarganegaraan bangsa Indonesia. PKS lupa terhadap setumpuk bukti di pelupuk mata bahwa kejahatan Orde Baru telah menimbulkan kemerosotan moral bangsa dan negara Indonesia. Iklan PKS jelas mengarah kepada penghancuran moralitas politik hak asasi manusia yang telah dibawa dalam agenda reformasi. Jika tujuan iklan PKS untuk mendorong rekonsiliasi maka konsep rekonsiliasi di sini tidak bisa menjadi titik pijak untuk membangun masa depan bangsa karena rekonsiliasi tanpa keadilan adalah sebuah rekonsiliasi semu.

Bapak Presiden yang kami hormati, kami meminta makna rekonsiliasi harus menyentuh hal yang substantif yaitu memulihkan hak atas kebenaran, hak atas keadilan dan hak atas keadilan; bukan hanya bersifat formalistik belaka. Penegakan supremasi hukum bukan berarti kita berhak untuk melakukan politik balas dendam karena sejatinya filosofi hukum adalah bentuk keadilan, berarti orang bersalah berhak menerima hukuman dan orang benar berhak mendapatkan penghormatan. Keadilan tidak bisa dikompromikan dan hukum adalah hukum yang harus ditegakkan di negara ini.

Jakarta, 11 Desember 2008
Hormat kami,

JSKK

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan kepada :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
Bapak Ketua Komnas HAM